

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sangat penting bagi manusia dan negara, karena pendidikan adalah salah satu kunci dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, negara yang berperan sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik. Di dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada pasal 34 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 juga disebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Untuk mewujudkan Undang-undang tersebut, maka Pemerintah wajib menyelenggarakan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar yaitu di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan pada tahun 2009 APK SMP telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah

tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi *Education For All* (EFA) di Dakar.

Sebagai upaya melaksanakan kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa biaya, Pemerintah menciptakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS. Program BOS untuk selanjutnya bukan hanya berperan untuk mempertahankan jumlah peserta didik saja, tetapi juga harus berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu, kenaikan jumlah dana BOS yang signifikan mulia tahun 2009 diharapkan menjadikan BOS sebagai pilar utama untuk mewujudkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.

Unsur yang terlibat di dalam pengelolaan BOS adalah Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan sekolah. Semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan BOS ini sangat diharapkan dapat memahami ketentuan-ketentuan teknis yang harus dijalankan dalam rangka penyelenggaraan program BOS. Kesalahpahaman oleh pengelola dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program BOS ini.

Sekolah menempati posisi yang paling penting dalam penentuan penggunaan dana BOS, karena sekolah merupakan instansi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana. Menurut ketentuan yang ada, dana BOS dikelola oleh kepala sekolah atau tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara BOS. Sekolah boleh menggunakan dana BOS untuk beberapa jenis pengeluaran, berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh sekolah dan Komite Sekolah. RKAS sendiri adalah plafon pendanaan yang dibutuhkan dan harus disediakan serta direncanakan asal dana tersebut didapatkan. RKAS inilah yang menjadi dasar pengelolaan manajemen sekolah. Tidak sekedar teknis pelaksanaan tetapi juga non teknis, dalam hal ini pendanaannya.

Dari semua penyimpangan dan kesalahan yang terjadi tidak semuanya disebabkan oleh faktor kesengajaan, ada juga yang disebabkan karena faktor kesalahan pemahaman terhadap petunjuk penggunaan dana BOS. Kurang spesifiknya petunjuk yang ada dalam panduan pengelolaan dana BOS menimbulkan penerjemahan yang berbeda-beda oleh pengelola BOS di tiap-tiap sekolah. Karena terjadi hal-hal tersebut, maka akan menjadi permasalahan dan menimbulkan dugaan penyelewengan.

Pengawasan pengelolaan dana BOS tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat. Penyelewengan yang terjadi secara tidak langsung juga merupakan akibat dari minimnya partisipasi dan transparansi publik. Pengelolaan BOS selama ini terlalu didominasi oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Peran warga sekolah dan masyarakat kurang diperhatikan dalam pengawasan pelaksanaan BOS. Padahal

dengan pengendalian dari publik, masalah penyelewangan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa dokumen surat pertanggung jawaban BOS adalah dokumen yang bersifat terbuka. Dengan keputusan ini diharapkan masyarakat dapat ikut mengawasi penyelenggaraan dana BOS agar berjalan dengan baik dengan penyimpangan seminim mungkin.

Ada salah satu Sekolah Menengah Pertama Katolik yang akan penulis jadikan sebagai tempat penelitian. Sekolah ini berada di Kota Malang Jawa Timur. Penulis berharap dapat menganalisis sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran dana BOS di SMP swasta ini.

Penelitian mengenai analisis sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran keuangan BOS di sekolah masih jarang dilakukan. Padahal pengelolaan keuangan dalam BOS adalah faktor yang sangat penting dan menentukan dalam keberlangsungan program BOS.

Oleh karena itu penulis memilih judul **“ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI KASUS PADA SMPK MARDI WIYATA MALANG)”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan maka masalah yang akan diteliti adalah: **Bagaimana menganalisis sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di SMPK Mardi Wiyata?**

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di SMPK Mardi Wiyata.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi pengelola dana BOS Sekolah

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagaimana seharusnya sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang benar.

2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman akan pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).